



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
T.A 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
JL.LINTAS GUNUNGTUA-LANGGA PAYUNG KM, 5**

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, telah berjalan sesuai dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja yang ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rancangan Akhir Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Gunungtua, 15 Agustus 2024  
Pit. **KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**RAJA PANDI SIREGAR, ST, MM**  
**PEMBINA IV/a**  
**NIP.197707142009041001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluai Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renja OPD .....	6
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	8
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rancangan Rencana Kerja OPD .....	9
3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	10
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>13ss</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah dokumen rencana pembangunan OPD yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam mendukung pelaksanaan tugas Bupati Padang Lawas Utara dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional dan Daerah sebagai landasan dan dokumen perencanaan nasional dan daerah secara menyeluruh berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dipertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utaramelalui Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan bidang tanah yang meliputi rumah umum, rumah swadaya, kawasan permukiman dan Prasarana dan Saranan Utilitas (PSU).

Sebagai instansi teknis dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah dari pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih dan harus mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017 yang mengatur mengenai sasaran pokok / arah kebijakan RPJMD 2018 – 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Perubahan Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024 merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2024 - 2026. Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Perubahan Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (chek and balance) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun tujuan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **1.3.2. Tujuan**

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;

3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

**Perubahan Rancangan Kerja ini juga dijadikan bahan acuan untuk :**

1. Penyusunan APBD melalui Musrenbang Kecamatan
2. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan OPD;
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP).

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja**

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen induk awal Perencanaan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara. Perubahan Rencana Kerja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara adalah merupakan salah satu Dinas yang terbentuk tahun 2017. Keseluruhan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga tercapainya sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1

**Tabel T-C-29**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI IKU DAN IKK OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI TAHUN 2024**  
**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara**

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulian				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (RPJMD Tahun 2019-2023)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024	Peringkat Daerah Peringkat Jawa
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II				
					Rata-Rata Capaian Kinerja Prediktor Kinerja													K
2.1	Terwujudnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1.125.856.000	0	1.188.320.000	499.112.000	-	220.940.000	76.140.000	-	297.080.000	0%	131,99%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.1		1.04.02.4	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana	25 Unit	300.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0%			
2.1.1		1.04.02.4.1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0%			
2.1.1		1.04.02.3	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1200 Peserta	575.385.600	0	297.080.000	299.112.000	0	220.940.000	76.140.000	0	800	0%	99,32%		
2.4		1.04.02.3.1	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	0 Orang	299.112.000	0	297.080.000	299.112.000	0	220.940.000	76.140.000	0	800	0%	99,32%		
2.4.1					0 Orang	299.112.000	0	297.080.000	299.112.000	0	220.940.000	76.140.000	0	800	0%	99,32%		
4.1	Memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	589 Unit	8.150.000.000	0	0	500.000.000	-	499.966.000	499.966.000	0	499.966.000	0%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.1.1		1.04.04.1.1	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	0 Unit Rumah	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0%			
4.1.1				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Perencanaan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	30	499.966.000	0%			
5.1	1. terwujudnya lingkungan yang sehat yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas 2. terwujudnya infrastruktur pedesaan yang baik dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan 3. terwujudnya jalan lingkungan yang berkualitas dan mendukung perkembangan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS URMUM (PSU)	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	16.504.903.431	2	2.295.978.647	16.504.903.431	0	148.495.000	4.810.439.000	2	11.498.925.150	66,67%	27,82%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.1.1		1.04.05.16	Uraian Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6 Lokasi	16.504.903.431	2	2.295.978.647	16.504.903.431	0	148.495.000	4.810.439.000	2	11.498.925.150	33,33%	30,05%		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Perumahan Rakyat bahwa selama 3 (tiga) Tahun setelah berlakunya Undang-undang ini seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki rencana tata ruang wilayah yang telah di Perdakan akan tetapi akan terlaksana di Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum memiliki Perda Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terkait dengan ini maka Pemerintah Pusat membuat kebijakan Nasional untuk memberikan fasilitasi percepatan legalisasi Perda RTRW Kabupaten/Kota dan mulai tahun anggaran 2017 Pemerintah Pusat tidak akan memberikan bantuan untuk menyusun rencana Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat telah menyediakan Tenaga Ahli Individual yang memiliki keahlian untuk mendampingi Pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pembangunan untuk sektor cipta karya Pemerintah Pusat telah menentukan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan sumber dana APBN harus sesuai dengan RPJM yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila usulan yang dilakukan tidak termuat didalam RPJM maka usulan tersebut akan ditolak. Khusus untuk penyelenggaraan pembangunan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pada kota-kota besar di Kabupaten Padang Lawas Utara yang perlu ditangani adalah ketersediaan TPA regional dan sistem *sanitarylandfill* sedangkan kota menengah yang kecil perlu pembangunan TPA sistem *controlledlandfill*, dalam pembangunan TPA ini perlu melibatkan peran masyarakat dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya penanganan sampah dengan skala lingkungan. Untuk penanganan air limbah pada kota besar perlu adanya pembangunan IPAL secara terpusat sedangkan kota menengah perlu penanganan dengan pembangunan IPLT dengan didukung pembangunan air limbah setempat dengan berbasis masyarakat setempat.

Meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya daerah Kawasan permukiman mengakibatkan daerah resapan berkurang akibatnya terjadi daerah genangan di perkotaan sehingga perlu adanya perencanaan dan sistimatis didalam pembangunan

saluran drainase guna mengendalikan dan mengurangi dampak banjir dan daerah genangan.

Terbatasnya kuantitas air baku dan penyebarannya yang tidak merata serta belum adanya konsep pengelolaan pengusahaan air minum yang optimal dan juga kurang terpeliharanya bangunan air minum perlu adanya dokumen perencanaan untuk Air Minum Sambungan Rumah yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota serta yang bersifat kawasan, selain itu juga perlu adanya pembinaan terhadap kelembagaan dan masyarakat didalam pengelolaan air bersih.

Banyaknya bangunan yang tumbuh tanpa adanya perencanaan serta banyaknya bangunan gedung yang tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana kebakaran. Perlu adanya aturan untuk pengaturan perijinan dan ketentuan pengadaan prasarana dan sarana sehingga dapat tercipta bangunan gedung yang aman, nyaman dan layak. Pada sisi lain rusaknya bangunan gedung bersejarah serta menurunnya lingkungan permukiman baik pada kawasan tradisional maupun kawasan-kawasan kumuh perlu ditangani melalui penyusunan rencana tindak dan revitalisasi kawasan selain itu juga diperluasnya ruang terbuka publik yang dapat memberikan kota dan lingkungan yang layak huni.

Dalam bidang Perumahan pemerintah memberikan dukungan untuk rumah tinggal layak huni yang dapat ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk itu pemerintah pusat akan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kabupaten/kota.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal OPD**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman pengaturan pembangunan sesuai dengan rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemanfaatan rencana Perumahan yang didukung oleh pelaksanaan pengendalian yang optimal.
2. Membangun prasarana dan sarana Kawasan permukiman pada kawasan lintas kabupaten
3. Membangun kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dalam bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
4. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam bidang perumahan adalah :
  - a. Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi norma, standard, pengaturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.

- b. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- c. Terbangunnya prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan terutama drainase dan jalan poros pada kawasan agropolitan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d. Tersedianya rencana rinci kawasan strategis di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e. Terbangunnya jaringan drainase di Kabupaten Padang Lawas Utara .
- f. Terbangunnya dan terpeliharanya jalan lingkungan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- g. Terbangunnya jalan poros kawasan agropolitan/agromarinepolitan di kabupaten Padang Lawas Utara .
- h. Tersedianya prasarana dan sarana lingkungan Kawasan permukiman di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **3.3 Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan clanteknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain:

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									11.535.419.426,00	14.159.402.984,00	14.066.170.620,00	2.530.751.194,00						11.861.340.140,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.355.419.426,00	13.979.402.984,00	13.886.170.620,00	2.530.751.194,00						11.711.340.140,00		
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							11.355.419.426,00	13.979.402.984,00	13.886.170.620,00	2.530.751.194,00						11.711.340.140,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				CC Predikat	CC Predikat	2.967.326.426,00	2.918.597.984,00	2.825.365.620,00	-301.579.286,00						2.665.747.140,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		18.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			9.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			9.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.968.837.526,00	1.775.930.984,00	1.461.798.620,00	-507.038.906,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		1.750.097.140,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				221 Orang/bulan	221 Orang/bulan	1.653.987.526,00	1.470.530.984,00	1.385.508.620,00	-268.478.906,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.435.247.140,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	305.400.000,00	305.400.000,00	66.840.000,00	-238.560.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			305.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			9.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	110.000.000,00	77.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		32.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	110.000.000,00	77.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			32.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				7 Kegiatan	7 Kegiatan	386.788.900,00	324.331.000,00	459.731.000,00	72.942.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		346.980.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	78.748.600,00	0,00	0,00	-78.748.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			82.978.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.115.700,00	101.407.600,00	101.407.600,00	16.291.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			47.530.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.502.500,00	14.502.500,00	14.502.500,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			14.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			26.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.574.100,00	39.572.900,00	39.572.900,00	-1.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			39.568.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.602.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.048.000,00	100.048.000,00	235.448.000,00	135.400.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Kegiatan	3 Kegiatan	305.010.000,00	581.646.000,00	581.646.000,00	276.636.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		297.270.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.900.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-5.100.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			47.160.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	23.210.000,00	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			23.210.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	497.736.000,00	497.736.000,00	281.736.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			216.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	234.790.000,00	184.790.000,00	193.290.000,00	-41.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	134.790.000,00	134.790.000,00	143.290.000,00	8.500.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				100 persen	-	62.500.000,00	1.262.500.000,00	62.500.000,00	-10.000.000,00							52.500.000,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				100 Persen	-	62.500.000,00	1.262.500.000,00	62.500.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				2 Unit Rumah	38 Unit Rumah	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA INSENTIF DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota				-	100 persen	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00							0,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana</i>				-	100 Persen	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota				100 persen	100 persen	8.325.593.000,00	9.798.305.000,00	9.798.305.000,00	667.500.000,00							8.993.093.000,00	
	1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Tersedianya PSU di Kawasan Perumahan/ Permukiman</i>				100 Persen	100 Persen	8.325.593.000,00	9.798.305.000,00	9.798.305.000,00	1.472.712.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		8.993.093.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	87.500.000,00	49.192.000,00	49.192.000,00	-38.308.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			87.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				5 Lokasi	5 Lokasi	8.238.093.000,00	9.749.113.000,00	9.749.113.000,00	1.511.020.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			8.905.593.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00							150.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00							150.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				100 Persen	100 Persen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-30.000.000,00							150.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Berita Acara	2 Berita Acara	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>J U M L A H</b>									<b>11.535.419.426,00</b>	<b>14.159.402.984,00</b>	<b>14.066.170.620,00</b>	<b>2.530.751.194,00</b>							<b>11.861.340.140,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah yang bersifat langsung berdampak kepada masyarakat.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat mensinergikan dengan RKPD yang mendukung pada pembangunan Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pengendalian dan pemanfaatan Tanah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Disadari bahwa pencapaian tujuan dan sasaran sebagai mana yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu Kepala Dinas beserta aparatnya akan terus melakukan evaluasi kinerja maupun evaluasi terhadap program kegiatan yang mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**RAJA PANDI SIREGAR, ST, MM**  
**PEMBINA IV/a**  
**NIP.197707142009041001**